TSAQOFAH
Jurnal Penelitian Guru Indonesia

p-ISSN : 2810-0395
e-ISSN : 2810-0042

Terindeks : Dimensions, Scilit, Lens, Semantic, Garuda, Google Scholar, Base, etc

https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v4i1.2263

IMPLEMENTASI DEMOKRASI PADA JENJANG PERKULIAHAN

Implementation of Democracy at the University Level

Selly Eka Audina[1], Naurah Salsabila Az Zahra[2], Ahmad Rizal Baihaqi[3], Ari Metalin Ika Puspita[4]
Universitas Negeri Surabaya
azzahrah0912@gmail.com; selly.22012@mhs.unesa.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Nov 26, 2023	Dec 1, 2023	Dec 5, 2023	Dec 9, 2023

Abstract

Democracy as a system has been used as an alternative in various social and state activities in several countries, one of which is Indonesia which adheres to a democratic government system. Democracy as a state principle is essentially oriented towards the role of society in administering the state as the highest institution which aims to realize people's sovereignty. The application of democracy in Indonesia often experiences changes, there are several types of democracy such as: 1) democracy based on channeling the will of the people 2) democracy based on ideological principles 3) democracy based on the focus of attention. The democratic system implemented in Indonesia often experiences changes from democracy during the revolution (1945-1950), parliamentary democracy (1950-1959), guided democracy (1955-1966), democracy in the New Order government (1966-1998), democracy during the New Order era. reform (1999-present). In this research, the researcher wants to know about democracy at the college level. With that, researchers used qualitative methods. Qualitative methods are used to obtain in-depth data on research conducted. In this research, the data used is based on the results of interviews conducted directly with one of the sources, so that the data obtained can be verified as true. The research results show that democracy is a form of government in Indonesia, in which form of government the highest power is in the hands of the people. Apart from being applied in a democratic society, it is also applied at the college level. At the college level, democracy is applied to all students, namely by giving them the right to express their opinions and ideas. The implementation of democracy at the college level certainly cannot run smoothly without experiencing obstacles. However, apart from obstacles, there are also supporting factors that are driving the implementation of democracy at the college level.

Keywords *: Democracy; Qualitative; Lecture Level.*

Jurnal Tsaqofah is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

Abstrak: Demokrasi sebagai suatu sistem telah dijadikan alternatif dalam berbagai tatanan aktivitas bermasyarakat dan bernegara di beberapa Negara, salah satunya yaitu negara Indonesia yang mengnut system pemerintahan demokrasi. Demokrasi sebagai prinsip negara pada hakikatnya telah berorientasi pada peran masyarakat dalam penyelenggaraan negara sebagai lembaga tertinggi yang bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Penerapan demokrasi pada negera Indonesia sering mengalami perubahan, terdapat beberapa jenis demokrasi seperti: 1) demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat 2) demokrasi berdasarkan prinsip ideologi 3) demokrasi berdasarkan fokus perhatiannya. sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia sering mengalami perubahan dari demokrasi masa revolusi (1945-1950), demokrasi parlementer (1950-1959), demokrasi terpimpin (1955-1966), demokrasi dalam pemerintahan orde baru (1966-1998), demokrasi pada masa orde reformasi (1999-sekarang). Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui tentang demokrasi pada jenjang perkuliahan. Dengan itu peneliti menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan suatu data yang mendalam terhadap suatu penelitian yang dilakukan. Pada penelitian ini data yang digunakan yaitu berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan secara langsung terhadap salah satu narasumber, sehingga data yang diperoleh dapat di pertanggungjawabkan kebenarannya. Hasil penelitian menunjukkan demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan yang ada di Indonesia, yang mana bentuk pemerintahan tersebut kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat. Selain diterapkan dalam masyarakat demokrasi juga diterapkan pada jenjang perkuliahan. Pada jenjang perkuliahan demokrasi diterapkan pada semua mahasiswa, yaitu dengan memberikan mereka hak untuk menyampaikan pendapat dan ide yang dimiliki. Dalam implementasi demokrasi dalam jenjang perkuliahan tentunya tidak dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan yang dialami. Tetapi selain hambatan juga terdapat faktor pendukung yang menjadi pendorong dalam penerapan demokrasi pada jenjang perkuliahan.

Kata Kunci : Demokrasi ; Kualitatif ; Jenjang Perkuliahan

PENDAHULUAN

Di Indonesia, banyak orang mulai merusak sistem politik pada awalnya. Namun, seluruh pemerintahan yang telah bertahan sejak era reformasi 1998 hingga saat ini adalah pemerintahan sistem demokratis. Meskipun ada beberapa kekurangan dan tantangan di sini. Dengan pengenalan sistem domokrati di Indonesia, kelompok-kelompok tertentu percaya bahwa mereka telah memperoleh kemerdekaan. Artinya, kebebasan pers sudah menempati ruang yang sebebas-bebasnya, oleh karena itu setiap orang berkewajiban untuk mengajukan petisi dan aspirasi secara individual. Jika demokrasi juga merusak moral dan memperlambat kemajuan politik yang terbatas pada teks-teks politik, maka pendidikan politik menjadi salah satu prinsip yang paling penting dalam membangun demokrasi. Dengan kata lain, reformasi diperlukan untuk mencapai masyarakat demokratis yang sehat dan stabil. Karena itu, membangun sistem demokrasi tidak hanya membutuhkan prinsip-prinsip moral yang kuat. Tidak hanya kualitas bebas produk, tetapi juga kualitas ketanggapan dari proses manufaktur. Tidak hanya berjilbab atau berbicara semata, kebebasan pembicaraannya juga. Dan tidak hanya menekankan kualitas legislatif yang dapat menaikkan standar hidup rakyat, tetapi juga

menonjolkan kualitas eksekutif yang dapat meningkatkan standar kehidupan rakyat(*MahkaMah Konstitusi Repubublik Indonesia*, n.d.).

Demonstrasi adalah kebutuhan yang sangat penting bagi setiap warga negara serta komponen penting dari pembroke setiap bangsa. Pada saat ini, ada dua cara untuk melakukan demokrasi: satu orang, satu suara demokrasi dan non-panjang demokrasi yang dilakukan oleh permusyawaratan, permufakatan, dan perwakilan. Kedua-duanya adalah sistem yang demokratis.

Salah satu negara yang merusak sistem demokrasi adalah Indonesia. Rakyat, rakyat, dan rakyat sendiri membentuk sistem pemerintahan. Demokrasi didasarkan pada adopsi bertahap dari kewarganegaraan universal (pemilu). Indonesia Presiden dan Wakil Presiden sudah menyelenggarakan pemilu. dengan tenang dan sengaja(*Demokrasi-Jurnal_UNPAR*, n.d.). Menurut John Locke dalam bukunya Two Treaties Of Civil Government Mengemukakan bahwa kekuasaan penguasa tidak pernah mutlak, tetapi selalu terbatas, karena itu individu-individu tidak menyerahkan seluruh hak-hak alamiah mereka. John Locke juga menjelaskan bahwa untuk mengurangi kekuatan pertahanan nasional dan memastikan keamanan warga negara, pertahanannya negara harus diperkuat oleh tiga kekuatan utama: legislatif (yang menciptakan hukum), eksekutif (yang menegakkan hukum dan mempertahankan ketertiban), dan federal. (which does not include emergency measures) (Purnamawati, n.d.).

METODE

Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui tentang demokrasi pada jenjang perkuliahan. Dengan itu peneliti menggunakan metode kualitatif. Menurut Creswell (2008) dalam (Hadisaputra, 2021) menyatakan penelitian kualitatif adalah *"Qualitative research is a type of educational research in which the researcher relies on the views of participants; asks broad, general questions; collects data consisting largely of words (or text) from participants; describes and analyzes these words for themes; and conduct the inquiry in a subjective, biased manner."* Yaitu penelitian kualitatif adalah penelitian yang berdasarkan pandangan partisipan atau informan (Hadisaputra, 2021).

Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan suatu data yang mendalam. Pada penelitian ini data yang digunakan yaitu berdasarkan hasil wawancara secara langsung terhadap salah satu narasumber, sehingga data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dengan menggunakan metode kualitatif pada penelitian dapat memberikan

deskripsi dan informasi secara lebih rinci dan jelas dari suatu penelitian yang dilaksanakan yaitu tentang tentang demokrasi pada lingkup perkuliahan (Dr. H. Zuchri Abdussamad, n.d.).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Demokrasi sebagai suatu sistem telah dijadikan alternatif dalam berbagai tatanan aktivitas bermasyarakat dan bernegara di beberapa Negara, salah satunya yaitu Indonesia. Demokrasi sebagai prinsip negara pada hakikatnya telah berorientasi pada peran masyarakat dalam penyelenggaraan negara sebagai lembaga tertinggi. Karena demokrasi merupakan kekuasaan pemerintah yang dimana kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat (Materi Pembelajaran Non et al., 2012).

Menurut Abraham Lincoln dalam (Lutpiani, n.d.) Democracy is government of the people, by the people, and for the people (Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat). Menurut Mohammad Hatta Demokrasi sebagai sebuah pergeseran dan penggantian kedaulatan raja menjadi kedaulatan rakyat. Sejalan dengan pendapat Abraham Lincoln dan Mohammad Hatta menurut Hans Kelsen Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang melaksanakan kekuasaannegara ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih. Dimana rakyat telah yakin, bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan didalam melaksanakan kekuasaan negara (Lutpiani, n.d.).

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari wawancara, "demokrasi adalah salah satu bentuk pemerintahan yang ada di Indonesia. Pemerintahan demokrasi yaitu pemerintahan yang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Maksud dari kata tersebut yaitu dimana kekuasaan pemerintahan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh rakyat atau wakil-wakil rakyat yang telah mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas. Yang dimaksus bebas ialah mereka dapat memilih wakil rakyat sesuai dengan keinginan mereka tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun. Seiring berjalannya waktu demokrasi juga diterapkan didalam sluruh interaksi yang ada dimasyarakat. Salah satunya yaitu demokrasi Pancasila yaitu penyamarataan hak-hak semua masyarakat. Dalam lingkup perkuliahan demokrasi memiliki peran yang penting sebagai bekal saat mereka berada pada lingkup Masyarakat." Dapat disimpulkan bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat oleh rakyat, dan untuk rakyat yang memiliki arti dimana rakyat memiliki kekuasaan tertinggi. Sistem demokrasi juga diterapkan dalam lingkup masyarakat maupun pada jenjang perkuliahan.

Sistem demokrasi juga diterapkan pada jenjang perkuliahan yaitu dengan menyamaratakan semua mahasiswa dan memberikan mereka kesempatan untuk berpendapat. Berdasarkan hasil wawancara Penerapan demokrasi dalam lingkup kampus dapat dilakukan dengan cara diadakanannya diskusi untuk mengumpulkan ide-ide yang dimiliki oleh mahasiswa dalam mencapai suatu tujuan yang diinginkan atau yang ingin dicapai.

Dalam implementasi demokrasi pada jenjang perkuliahan tentunya tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan. karena dimana saat kita menyatukan banyak orang dengan kemauan dan cara berfikir yang berbeda-beda pula. Sehingga, tak jarang munculnya pro dan kontra dalam jalannya sebuah diskusi atau musyawarah yang dilakukan. Munculnya pro dan kontra meruapakn sebuah hambatan yang muncul dalam implementasi sebuah demokrasi pada lingkup perkuliahan. Hal tersebuat dapat membuat sebuah organisasi dapat terpecah belah.

Untuk mengatasi hambatan yang terjadi diperlukannya sebuah solusi agar hambatan tersebut dapat diselesaikan sehingga demokrasi dalam lingkup perkuliahan dapat berjalan dengan lancar. Upaya dan solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu dengan melakukan pendekatan pada individu-individu yang ada dan dengan dilakukannya sebuah mediasi. Mediasi dilakukan dalam upaya untuk mencari jaaln tengah dari hambatan yang muncul. Dalam sebuah mediasi diharap mampu membuat permasalahan yang ada menjadi selesai dan dapat meminimalisir terjadinya perpecahan atau konflik dalam sebuah organisasi. Maka dari itu demokrasi dalam sebuah organisasi dalam lingkup perguruan tinggi sangat penting dialakukan agar masyarakat yang ada pada perguruan tinggi merasa bahwa haknya untuk berpendapat terpenuhi sehingga tujuan yang diingin dapat tercapai dan disetujui oleh semua pihak.

Dalam penerapan demokrasi terdapat prinsip demokrasi dan nomokrasi dalam Aman- demen UUD 1945 dan implementasi dari prinsip demokrasi dan nomokrasi dalam struktur ketatanegaraan pasca amandemen UUD 1945 (Martha, 2011). Peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dapat menjamin dengan prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat. Segera setelah peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan telah mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Kepala daerah adalah badan eksekutif yang ditugaskan untuk mengeluarkan undang-undang berdasarkan kehendak rakyat, sehingga perlu bagi rakyat untuk mencari hukum yang berkaitan dengan daerah dengan cara yang membuat mereka efektif dalam melaksanakan tugas-tugas mereka di masa

depan setelah ditunjuk oleh Departemen Pembangunan Daerah dan disetujui oleh kepala daerah. Gubernur daerah menerapkan program pembangunan regional sesuai dengan wewenang rakyat untuk melaksanakan pemerintahan daerah. Menurut prinsip-prinsip dasarnya, negara harus memberikan dukungan kepada rakyat, mendorong kreativitas dan prakarsa, meningkatkan upaya individu dan masyarakat, dan memperkuat peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pemerintahan negara yang demokratis.(Sunarto & Welly, n.d.)

Di kancah internasional, tidak sedikit negara-negara yang menganut sistem politik demoktasi. Berbagai negara yang menjadi penganut tetap paham demokrasi mengamalkan prinsip atau nilai yang tidak sama dengan sistem politik lainnya. Untuk memahaminya secara lebih mendetail, berikut disebutkan berbagai prinsip sistem politik demokrasi antara lain: (Dedi, n.d.)

1. Pemisahan kedudukan atau kekuasaan, dalam hal ini adalah kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang dalam praktiknya digerakkan oleh lembaga yang tidak sama.
2. Kebebasan bersuara atau kebebasan pers.
3. Keterbukaan manajemen, dalam artian kontribusi rakyat untuk mengambil posisi di badan pemerintahan, pembuktian tanggung jawab kepada rakyat oleh pemerintah, bantuan moral dan materi sebagai guna mendukung pemerintah, dan supervisi oleh rakyat kepada pemerintah.
4. Penyebaran beragam golongan parpol yang bergerak sesuai fungsinya.
5. Kebebasan memilih dalam pemilu.
6. Hukum adalah pondasi berjalannya pemerintahan, yakni; kedudukan tertinggi adalah hukum, keadilan di hadapan hukum, dan ketiadaan ketimpangan sosial.
7. Pemerintahan berbasis konstitusional.
8. Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.
9. Menjamin tegaknya keadilan.

Demokrasi juga memiliki beberapa jenis yang berbeda. Berikut adalah beberapa jenis demokrasi (Syamsu, 2019).

1. Demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat
    a. Demokrasi Langsung. Secara teoritis, kategori demokrasi ini memfasilitasi seluruh masyarakat dengan adanya pengadaan musyawarah dalam

merumuskan haluan kebijakan umum baik itu menurut undang-undang maupun negara. Demokrasi langsung berfungsi ketika suatu negara memiliki jumlah penduduk yang amat rendah dikarenakan wilayahnya yang kecil. Dari segi historis, pada peradaban Yunani Kuno, negara Athena di abad ke-4 memberlakukan demokrasi langsung,

b. Demokrasi Tidak Langsung. Secara teoritis, kategori demokrasi ini diimplementasikan melalui sistem perwakilan suatu daerah.

2. Demokrasi Berdasarkan Prinsip Ideologi.
    a. Demokrasi liberal. Merupakan wujud demokrasi yang bersikap abai terhadap kepentingan bersama dan menjunjung tinggi kebebasan individu. Karakteristik utama demokrasi liberal yang dianut oleh pemerintahan merupakan tidak terbatasnya kekuasaan dalam pemerintahan dengan aturan untuk tidak bertindak sewenang-wenang dan melakukan campur tangan terhadap urusan rakyatnya.
    b. Demokrasi Rakyat. Merupakan wujud demokrasi yang mengacu pada ideologi sosialisme dan komunisme karena lebih mementingkan kepentingan global atau nasional. Sistem politik demokrasi rakyat mulai dikenal saat era Perang Dingin dan di implementasikan di benua Eropa sebelah Timur seperti Yugoslavia, Bulgaria, Rumania, Hungaria, Polandia, Cekoslovakia, dan Tiongkok. Demokrasi tipe ini juga lebih dikenal dengan sebutan demokrasi proletar yang mengarah pada ideologi Marxisme-Komunisme.
    c. Demokrasi Pancasila Merupakan wujud demokrasi yang berlaku dan sah di Indonesia, yang dilaksanakan atas dasar perjanjian sosial budaya bangsa Indonesia dengan menjaga keutuhan hak prioritas masing-masing individu dan memenuhi kebutuhan mereka sepenuhnya. Berbagai prinsip demokrasi yang diintegrasikan dalam sistem politik melalui penanaman nilai Pancasila. Demokrasi ini mengikutsertakan secara aktif waega negaranya sebagai pemersatu bangsa, bertoleransi, keberagaman, dan kedaulatan rakyat (Arif Baegaqi Dikdik, 2012).

3. Demokrasi berdasarkan fokus perhatiannya
    a. Demokrasi Formal

        Demokrasi formal adalah sistem politik yang sangat memprioritaskan kesetaraan di ranah politik, dengan tidak melakukan tindakan yang sifatnya melenyapkan bahkan mengurangi ketimpangan di bidang ekonomi.
    b. Demokrasi Material

        Demokrasi material mempertegas visi dan misinya dalam mengusahakan hilangnya kesenjangan terutuama di aspek ekonomi, hanya saja demokrasi ini tidak begitu memperhatikaan kesetaraan di aspek politik hingga di titik persamaan tersebut dilupakan. Dalam mengatasi isu kesenjangan ekonomi, pemerintah mengutus partai penguasa sebagai representatif negara untuk mengesahkan kepemilikan negara atas segala sesutu. Maknanya, tidak ada pengakuan terhadap hak milik pribadi.
    c. Demokrasi Gabungan

        Demokrasi gabungan adalah sistem politik yang mengkombinasikan hal-hal baik dan mulia sembari menghilangkan kecacatan dalam demokrasi material dan demokrasi formal. Kesetaraan hak dan derajat setiap rakyat mendapatkan pengakuan, namun pergerakan rakyat tidak diberi kebebasan untuk mempertahankan kesejahteraan. Demokrasi ini memiliki fokus yang cukup tinggi di ranah ekonomi maupun politik.

Sistem demokrasi ditegakkan di Indonesia. Sistem pemerintahan demokratis dikelola oleh, untuk, dan bersama rakyat. Penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) merupakan cerminan demokrasi. Indonesia menyelenggarakan pemilu untuk memilih presiden dan wakil presidennya secara langsung (Purnamawati, n.d.).

Ditinjau dari segi keterikatan atas kelengkapan aset dan instrumen negara serta wewenang, demokrasi dibedakan menjadi demokrasi presidensial dan parlemen, dimana karakteristik demokrasi parlementer dijelaskan di bawah ini:

1. Keputusan dan gerakan pemerintah tidak terbantahkan
2. Simbol negara adalah kedudukan dan kekuasaan kepala negara
3. Kabinet menetapkan program atau kebijakan yang relevan dengan tujuan politik setiap anggota parlemen
4. Menteri memiliki tanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

5. Pemerintah tidak dapat menandingi kekuatan DPR.

Sementara itu Demokrasi Presidensial atau demokrasi sistem pembagian atau pemisahan kekuasaan memiliki beragam karakteristik di antaranya adalah:

1. Presiden menjalankan kekuasaan eksekutif dengan mengacu pada kedaulatan yang rakyat pilih melalui lembaga perwakilan
2. Presiden mengkepalai negara
3. Presiden mempunyai kekuasaan mengangkat dan memberhentikan Menteri.
4. Menteri tidak bertanggung jawab kepada DIR melainkan kepada presiden.
5. Presiden dan DP mempunyal kedudukan yang sama sebagai lembaga negara, dan tidak dapat saling membubarkan.
6. Menteri tidak bertanggung jawab kepada DPR melainkan kepada presiden (Saidurrahman & Atifinsyah, 2018).

Struktur ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan akibat penerapan sistem demokrasi. Salah Strategi desentralisasi dan otonomi daerah merupakan salah satu perkembangan penting. Pada masa Orde Baru, daerah-daerah yang tidak puas dengan struktur kekuasaan yang terpusat menuntut otonomi. Mereka percaya bahwa sistem desentralisasi akan meningkatkan kualitas kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat, sedangkan sistem sentralisasi hanya dipandang mampu memberikan keuntungan bagi kelompok elit. Pada tahap ini, memutar telapak tangan tidaklah sesederhana kelihatannya. Praktik otonomi daerah hingga saat ini belum membuahkan hasil yang diharapkan. (Zuhro, 2018).

Fase perkembangan demokrasi Indonesia sebelum kemerdekaan dan pasca kemerdekaan dapat dibedakan satu sama lain. Sejak negara ini merdeka hingga saat ini, transisi demokrasi di Indonesia mengalami pasang surut. Permasalahan utama yang dihadapi adalah bagaimana demokrasi muncul dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk bidang hukum, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Aspek mendasar dari sistem pemerintahan demokratis adalah hubungan empirisnya dengan hubungan masyarakat-negara atau pemerintah, atau sebaliknya hubungan masyarakat-negara atau pemerintah dalam kondisi saling mengawasi dan seimbang (Ubaedillah & Rozaq, 2003).

1. Demokrasi Masa Revolusi (1945-1950)

Akibat revolusi fisik yang masih berlangsung, demokrasi pada saat itu belum sepenuhnya terlaksana. Masih terjadi pemusatan kekuasaan pada awal kemerdekaan. Pasal 4 Peraturan Peralihan UUD 1945 menunjukkan hal tersebut. Artinya, sebelum MPR, DPR, dan DPA dibentuk berdasarkan undang-undang ini, semua fungsi dijalankan oleh Presiden dengan bantuan KNIP (Lutpiani, n.d.). Pemerintah mengeluarkan beberapa maklumat untuk menghindari bahwa negara adalah negara yang absolute, seperti:

a. Maklumat Wakil Presiden No.X tanggal 16 oktober 1945, KNIP berubah menjadi lembaga legislatif;
b. Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang Pembentuksn Partai Politik.
c. Maklumat Pemerintah tangaal 14 November 1945 tentang perubahan system pemerintahan presidensial menjadi parlementer.
d.

2. Demokrasi Parlementer (1950-1959)

Demokrasi Parlementer di Indonesia berlangsung tahun 1950-1959. Dalam demokrasi parlementer, system partai sangat mendominasi sementara presiden dan wakil preseiden hanya sebagai simbolis. Pada tahun 1950-1959, ketika negara ini berada di bawah demokrasi parlementer, partai politik memainkan peran dominan dalam urusan nasional. UUDS 1950 menjadi dasar sistem pemerintahan ini, dan Partai Masyumi memainkan peran penting pada periode ini. Secara khusus, partai ini menjadi terkenal setelah ketua umumnya, Mayumi Muh. Natsir, mengajukan mosi internal untuk kembali ke NKRI (Nurdamarsah, 2018).

3. Demokrasi Terpimpin (1955-1966)

Indonesia menerapkan sistem Demokrasi Terpimpin ada periode 1955- 1966 Sukarno berhasil mengembalikan UUD 1945 ke bentuk aslinya melalui Dekrit 5 Juli 1959 yang mengubah sistem politik dari demokrasi liberal menjadi demokrasi terpimpin. Menyusul pergeseran politik tersebut, struktur politik sistem presidensial pun mengalami modifikasi. Fiksasi menyatukan kaum Marhaen yang saat itu tersebar pada poros kekuasaan nasionalisme, agama, dan komunisme diwujudkan dalam demokrasi terpimpin. Peran yang dimainkan oleh partai-partai elit dalam perselisihan

politik merupakan pendorong utama perpecahan ini. Oleh karena itu, kemandirian nasional tidak akan menghasilkan manfaat sosial.

Demokrasi liberal dianggap hanya melayani kepentingan individu dan organisasi, tanpa memperhatikan kesejahteraan umum masyarakat. Sukarno dengan demikian menegakkan kesetaraan dalam demokrasi, atau yang disebutnya sosio-demokrasi, yang berarti demokrasi politik dan demokrasi ekonomi, dalam praktik demokrasi terpimpin. membangun lembaga pengendalian produksi nasional dan kebijakan ekonomi yang dikendalikan negara merupakan langkah awal menuju pembangunan demokrasi ekonomi melalui pengendalian ekonomi kolektif, yang sering disebut dengan ekonomi terarah (Ilmar, 2018).

4. Demokrasi dalam Pemerintahan Orde Baru (1966-1998)

Pada masa pemerintahan orde banu, dikenal istilah demokrasi Pancasila (1966 1998) Dalam demokrasi ini, rakyat berpartisipasi pada PEMILU untuk memilih Partal. Ada 3 Partai pada masa ini, yatu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Partai Golongan Karya (GOLKAR), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Partai selanjutnya akan menentukan perwaklannya dalam DPR dan MPR berdasarkan persentase pilihan rakyat. Dalam era in, Presiden Dikenal dengan Mandataris (Pemegang Madat) MPR Pemilihan Presiden dilakukan pada forum sidang pleno MPR.

5. Demokrasi pada masa Orde Reformasi (1999- sekarang)

Demokrasi yang dikembangkan pada era reforma (pesos berakheya Orde Baru pada 21 Mei 1998 sebenamys adalah demokrasi yang beradasarkan kepada Pancasila dan UUD 1945. Upaya untuk menemukan formus terbaik dan dengan kebutuhan demokrasi pada masa in forthet pada pembentukan aturan-aturan baru sebagai berikut:

a. Ketetapan MPR RI Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok Pokok Reformas
b. Ketetapan Nomor VIVMPR/1998 tentang Pencabutan Tap MPR tentang Referendum
c. Ketetapan MPR RI Nomor XIMPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan KKN
d. Ketetapan MPR RI Nomor X/MPR/1998 tentang pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI
e. Amandemen UUD 1945 sudah sampai amandement I, II, III, IV

Sebagai bentuk pelaksanaan demokrasi, pada masa reformasi Pemilihan Umum 1999, dengan suasana yang berbeda dengan Orde Baru, yaitu

a. Banyaknya partai politik peserta pemilu
b. Pemilu untuk memah presiden dan wakil presiden secara langsung
c. Pemilu untuk mernih wakil-wakil rakyat yang akan duduk DPR MPR dan DPD
d. Pelaksanaan pemilu asas luber dan jurdil
e. Pemilihan kepala daerah secara langsung
f. Kebebasan penyampaian aspirasi lebih berbuka (Sugiarto, 2021).

KESIMPULAN

Demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat oleh rakyat, dan untuk rakyat yang memiliki arti dimana rakyat memiliki kekuasaan tertinggi. Sistem demokrasi juga diterapkan dalam lingkup masyarakat maupun pada jenjang perkuliahan. terdapat beberapa jenis demokrasi seperti: 1) demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat 2) demokrasi berdasarkan prinsip ideologi 3) demokrasi berdasarkan fokus perhatiannya. sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia sering mengalami perubahan dari demokrasi masa revolusi (1945-1950), demokrasi parlementer (1950-1959), demokrasi terpimpin (1955-1966), demokrasi dalam pemerintahan orde baru (1966-1998), demokrasi pada masa orde reformasi (1999-sekarang).

DAFTAR PUSTAKA

Dedi, A. (n.d.). IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI DI INDONESIA. *Jurnal MODERAT*, *7*(1).

Demokrasi-Jurnal_UNPAR. (n.d.).

Dr. H. Zuchri Abdussamad, S. I. K. , M. S. (n.d.). *Metode Penelitian Kualitatif*.

Hadisaputra, P. (2021). *PENELITIAN KUALITATIF*. https://www.researchgate.net/publication/353587963

Ilmar, A. (2018). Demokrasi Terpimpin Dalam Pemikiran Dan Praktik Politik. *Jurnal Polinter : Kajian Politik Dan Hubungan Internasional*, *4*(1), 21–36. https://doi.org/10.52447/polinter.v4i1.1276

Lutpiani, E. (n.d.). *IMPLEMENTASI DEMOKRASI DI INDONESIA*.

MahkaMah konstitusi repubublik indonesia. (n.d.). www.mahkamahkonstitusi.go.id

Materi Pembelajaran Non, H., Sulisworo, D., Wahyuningsih, T., & Baegaqi Arif, D. (2012). *BAHAN AJAR*.

Nurdamarsah, T. (2018). Politik Masyumi Di Masa Demokrasi Parlementer 1950-1959. *HERODOTUS: Jurnal Pendidikan IPS*, *1*(01), 21–28.

Prinsip-Prinsip Demokrasi di Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir Sunarto, B., & Welly, B. (n.d.). *Peran Pemimpin Daerah dalam Menuju Terciptanya Good Governance*.

Purnamawati, E. (n.d.). *PERJALANAN DEMOKRASI DI INDONESIA*. https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/1

Saidurrahman, & Atifinsyah. (2018). *PENDIDIKNAN KEWARGANEGARAAN NKRI Harga Mati*. Kencana Prenada Media.

Sugiarto, T. (2021). *Ensiklopedi Pendidikan Kewarganegaraan: Bangsa dan Demokrasi*. Hikam Pustaka.

Ubaedillah, A., & Rozaq, A. (2003). *Pancasila Demokrasi, Ham Dan Masyarakat Madani* (p. 128).

Zuhro, R. S. (2018). *DEMOKRASI, OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAHAN INDONESIA. Interaktif: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*. 1–28.